

Latar Belakang Sosio-Historis Kelompok Keturunan Cina di Indonesia

Onny. S. PRIJONO*

Sejarah telah menunjukkan bahwa pedagang dan pelaut Cina datang ke Indonesia sejak dahulu, bahkan sebelum masa pemerintahan Kerajaan Sriwijaya di Palembang dalam abad ke-6 sampai ke-12. Kontak pertama orang Cina dengan penduduk asli di negara-negara Asia Tenggara diperkirakan pada abad ke-3 SM, yaitu pada waktu tentara Cina berada di Tonkin dan Aman. Dari daerah-daerah ini mereka menuju Kamboja, Siam dan melalui jalan laut terus ke Semenanjung Malaysia, Sumatera sampai di Pulau Jawa.¹ Hasil peninggalan di Pulau Sumatera, Kalimantan dan Jawa membuktikan adanya hubungan sejak permulaan Dinasti Han.² Pada masa Dinasti Jin Timur, Pendeta Budha Fa Hsien (Fa Hien) dalam perjalanannya ke India singgah di Pulau Jawa (Jawadwipa) dan Semenanjung Malaysia. Karyanya yang berjudul *Fo Guo Ji* (Hikayat Kerajaan Budha) menyebutkan adanya hubungan baik antara Kanton dan Jawadwipa.³ Dalam abad ke-6, hubungan dengan Kerajaan Sriwijaya semakin erat dengan adanya persamaan agama, yakni Budha.

Pada waktu Dinasti Tang (618-907) Tiongkok berhasil mengirim ekspedisi militer ke daerah selatan sehingga perdagangan semakin ramai. Pada masa akhir pemerintahan Dinasti ini, orang Cina merantau dan terus menetap di Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Daerah pertama yang dikunjungi adalah Palembang yang pada masa itu merupakan pusat perdagangan Kerajaan Sriwijaya. Kemudian para perantau tersebut pergi ke Pulau Jawa untuk men-

*Staf CSIS.

¹Hidayat Z.M., *Masyarakat dan Kebudayaan Cina Indonesia*, Bandung: Penerbit Tarsito, 1977, hal. 63.

²Liang Li Ji, "Selayang Pandang Mengenai Indonesia di Tiongkok," *Archipel* 24, 1982, hal. 17.

³*Ibid.*, hal. 17.

cari rempah-rempah. Banyak di antara mereka kemudian menetap di daerah pelabuhan pantai utara Pulau Jawa. Pada masa Dinasti Sung (960-1280) banyak pedagang Cina mengunjungi Asia Tenggara dan ketika armada Cheng Ho (1371-1435) di bawah Dinasti Ching menguasai rute perjalanan di Asia Tenggara¹ banyak juga pedagang Cina yang menetap.

Orang Cina banyak merantau ke Asia Tenggara, karena pada masa Dinasti Ming (1368-1644) jumlah penduduk makin padat dan kehidupan makin sulit yang antara lain disebabkan tuan-tuan tanah menaikkan sewa tanah dan peraturan pemerintah yang menguntungkan mereka. Akibat pemberontakan kaum tani, keamanan makin kacau, terutama setelah timbul pemberontakan dan perang saudara serta penyerbuan dari suku bangsa Mongol.²

Sebetulnya pada Dinasti Ching (1644-1894), berdagang dan bermukim di seberang lautan pada dasarnya dilarang. Walaupun tidak efektif, dalam kenyataannya pusat-pusat imigran berkembang, terutama di Kalimantan Barat dan Bangka. Dalam abad terakhir ini jumlah tersebut makin meningkat dengan pesat, dengan adanya dua gelombang besar imigrasi. Pertama, mengalirnya para buruh Cina ke daerah perkebunan di Sumatera Utara dan Bangka antara tahun 1860 dan 1890; kedua, dalam usaha meningkatkan perdagangan, pemerintah kolonial telah memberi kelonggaran kepada orang Cina untuk berdagang di mana sebelumnya terjadi pembatasan bagi mereka untuk masuk dan menetap di daerah koloni. Akibatnya orang Cina makin tersebar dan heterogen karena pedagang Cina dapat bergerak dengan leluasa ke seluruh kepulauan.³

Pada abad ke-19 para perantau Cina tidak terbatas hanya pada kaum laki-laki saja, tetapi juga kaum wanitanya, bahkan dengan seluruh keluarganya. Dengan demikian jumlah orang Cina perantauan ini makin banyak dan proses asimilasi yang tadinya sering dilakukan oleh orang Cina perantauan dengan penduduk setempat menjadi kurang, bahkan akhirnya menutup diri dan membentuk golongan tersendiri lengkap dengan kehidupan tradisionalnya.⁴

Jika keseluruhan daerah luar Jawa dibandingkan dengan Pulau Jawa, maka tampak bahwa persentase orang Cina lebih besar di luar Jawa dan lebih tersebar di pedesaan. Daerah pemusatan yang paling padat, yaitu di mana

¹Hidayat Z.M., *op. cit.*, hal. 155.

²*Ibid.*, hal. 155.

³J.S. Furnivall, *Netherlands India*, (Cambridge, 1944), hal. 408-409; J.A.C. Mackie, *The Chinese in Indonesia*, Hong Kong, Singapore, Kuala Lumpur: Heinemann Educational Books (Asia) Ltd., 1976, hal. 4; B.P. Paulus, *Masalah Cina*, Bandung: PT Karya Nusantara, 1978, hal. 11-12.

⁴Hidayat Z.M., *Masyarakat dan Kebudayaan Cina Indonesia*, Bandung: Tarsito, 1977, hal. 61.

orang Cina merupakan seperlima atau lebih dari jumlah seluruh penduduknya, ialah: Kalimantan Barat (29,5%), Belitung (25,2%), Kepulauan Riau (27,9%) dan Bangka (32,0%).¹ Mereka ini juga sangat banyak terdapat di pantai timur Sumatera, mulai dari Deli dan Medan, terus ke selatan sampai Bengkulu. Di semua daerah tersebut ada daerah-daerah yang lebih kecil, di mana orang Cina merupakan pluralitas etnis, bahkan ada di mana mereka merupakan mayoritas penduduk. Sebagian besar imigran yang datang ke daerah ini mula-mula bermukim di daerah pedesaan untuk bekerja pada pertambangan dan perkebunan, tetapi setelah tambang dan kontrak habis, pekerja Cina di perkebunan digantikan oleh pekerja pribumi dari Jawa. Akibatnya banyak orang Cina memilih untuk menetap di daerah tersebut dan hidup sebagai petani atau nelayan.²

Imigran Cina yang pertama kali datang dalam jumlah besar adalah *Hokkien*. Mereka merupakan golongan terbesar di antara imigran-imigran sampai abad ke-19. Daerah asal mereka ialah Fukien Selatan, suatu daerah yang sangat penting menurut catatan sejarah perdagangan luar negeri Tiongkok. Kecenderungan dalam hal berdagang yang dimiliki kebudayaan Hokkien selama beberapa abad itu masih tampak jelas di Indonesia. Dibandingkan dengan bangsa Cina yang berbahasa seperti Hakka dan Kanton, orang Hokkien ini tidak saja lebih banyak berkecimpung dalam perdagangan, tetapi merekapun sering lebih berhasil. Lebih dari setengah jumlah orang Hokkien adalah pedagang, tetapi di Jawa Barat dan sekitar Batavia, pantai barat Sumatera sebagian terbesar berkecimpung dalam pertanian dan perkebunan, sedangkan di Bagansiapi-api pada umumnya adalah penangkap ikan. Orang Hokkien dan keturunannya yang sudah berasimilasi merupakan kelompok terbesar di Indonesia Timur, Jawa Tengah dan Timur, serta di pantai barat Sumatera. Meskipun orang *Hakka* (Kheh) termasuk kelompok besar yang merantau ke luar negeri, sebenarnya mereka bukanlah bangsa maritim. Pusat kampung halamannya yang terletak di pedalaman Propinsi Kwangtung terutama terdiri dari daerah yang berbukit-bukit dan tidak begitu subur. Dibandingkan dengan golongan bahasa lainnya, desakan ekonomi merupakan faktor dominan yang menyebabkan mereka menjadi emigran. Selama gelombang perpindahan yang besar dari tahun 1850 sampai 1930, orang-orang Hakka merupakan imigran yang paling melarat dari Tiongkok. Mula-mula mereka tertarik oleh daerah-daerah di luar Jawa untuk mengusahakan sumber-sumber mineral, dan sampai kini orang Hakka paling banyak di an-

¹Persentase untuk Kalimantan Barat didasarkan pada penduduk yang terdaftar yang dikumpulkan oleh pemerintah propinsi pada bulan Januari 1956 dan diperoleh di Pontianak. Persentase lainnya didasarkan pada penduduk yang terdaftar untuk tahun 1956 seperti yang tertera di dalam *Penduduk Indonesia* (Jakarta, 1958); Mely G. Tan (Ed.), *Golongan Etnis Tionghoa di Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia, 1979, hal. 6.

²*Ibid.*, hal. 6.

tara orang Cina di bekas distrik tambang emas di Kalimantan Barat, sedangkan dialek yang sekarang dipergunakan di Bangka yang bertambang timah itu berasal dari bahasa Hakka. Orang-orang Hakka pertama kali bermukim di Kalimantan Barat sekitar tahun 1740 sampai 1745, kemudian menyebar ke Sumatera Timur, Bangka dan Biliton pada akhir abad ke-19. Tetapi sejak akhir abad ke-19 banyak orang Hakka berdatangan ke Jawa Barat, karena tertarik oleh cepatnya pertumbuhan kota Jakarta dan dibukanya Priangan untuk pedagang-pedagang Cina. Banyak di antara orang Hakka dari Jawa dan Madura adalah pedagang, tetapi mereka juga tertarik pada industri. Dewasa ini jumlah orang Hakka adalah yang terbanyak di antara orang Cina di wilayah Jakarta Raya dan Jawa Barat.

Setelah orang Hakka, jumlah yang banyak adalah orang *Kanton* yang merupakan tetangga orang Hakka di sebelah barat dan selatan di Tiongkok dan berpusat di delta raya Sungai Mutiara atau Sungai Barat itu. Seperti juga orang Hakka, orang Kanton di Asia Tenggara terkenal sebagai pekerja tambang. Perpindahan mereka ke Indonesia pada abad ke-19 pada umumnya menuju ke pertambangan timah di Bangka. Meskipun banyak juga orang Kanton yang mulai datang ke Jawa pada waktu yang sama dengan kedatangan orang Hakka di Jawa, keadaan orang Kanton ini agak berbeda. Umumnya mereka ini datang dengan modal yang lebih besar di samping ketrampilan yang luar biasa untuk bertukang dan berusaha dalam bidang industri. Orang Kanton terkenal sebagai tukang yang trampil. Mereka memanfaatkan hubungan yang erat antara daerahnya dengan orang-orang Eropa di Kanton dan Hong Kong untuk memperoleh rahasia permesinan Barat, dan keberhasilan usaha industri. Dengan demikian orang Kanton menempatkan dirinya di kota-kota di Indonesia sebagai tukang-tukang yang mahir, pekerja mesin, pemilik toko besi atau industri kecil, di samping perannya sebagai pengurus restoran atau hotel. Bidang usaha mereka ini juga terkenal di negara-negara Barat. Kecilnya jumlah orang Kanton dibandingkan dengan orang Hokkien atau Hakka, dan juga menyebarnya lebih merata di seluruh Indonesia, menyebabkan orang Kanton ini kurang penting artinya di kalangan masyarakat Cina di mana-mana di Indonesia. Mereka tersebar di daerah pantai timur Sumatera, Sumatera Selatan, Kalimantan Timur dan Sulawesi. Mereka terdapat secara tidak proporsional di Jawa Timur dan Jawa Tengah, Kalimantan Selatan, Bangka dan Sumatera Tengah (sekarang Propinsi Riau, Jambi, dan Sumatera Barat).

Jumlah yang lebih sedikit dari orang Kanton adalah orang *Teochiu* yang berasal dari sebelah selatan daerah asal orang Hokkien sepanjang pantai Tiongkok. Mereka tinggal di pedalaman Swatow dan sepanjang pantai barat daya kota pelabuhan itu. Meskipun mereka memakai suatu dialek yang masih bisa dimengerti oleh orang Hokkien atau sebaliknya, namun mereka

cenderung untuk menonjolkan perbedaannya setelah tiba dan tinggal di perantaraan. Di Indonesia orang-orang Teochiu ini sebagian besar terdapat di luar Jawa. Mereka berkumpul di sepanjang pantai timur Sumatera (di mana pengusaha perkebunan lebih suka mempekerjakan mereka), di Kepulauan Riau, Indragiri, Jambi, Kalimantan Barat Laut, terutama di Pontianak dan distrik-distrik sekitarnya. Secara tradisional bidang spesialisasi mereka adalah pertanian, bahkan sampai sekarang di antara mereka masih banyak yang berkecimpung dalam bidang sayur-mayur dan pertanian komersial lainnya. Tetapi dalam 50 tahun yang terakhir ini orang Teochiu mulai menunjukkan kemajuan yang mantap dalam segala bidang perdagangan, dan di banyak daerah yang sedikit orang Hokkien-nya, orang Teochiu menguasai perdagangan.¹

Pada umumnya orang Cina beragama Konfusius, Budha dan Taoisme. Di samping itu ada juga yang masuk agama Islam. Di Makasar, orang Cina yang beragama Islam membentuk suatu partai yang terkenal dengan nama Partai Tionghoa Islam Indonesia.²

Orang Cina menekankan sistem nilai yang mementingkan kerajinan, hemat, pengendalian pada diri sendiri, semangat berusaha dan ketrampilan, ditambah pula dengan prinsip-prinsip organisasi sosial yang mudah sekali disesuaikan dan digunakan. Hal tersebut menyebabkan mereka berhasil dalam bidang ekonomi di suatu negara yang kaya alamnya, dan yang penduduk aslinya sama sekali berlainan orientasinya.³

Sejak permulaan abad ini dapat dibedakan dua golongan orang Cina di Indonesia, golongan pertama, ialah orang-orang *totok* secara harafiah (darah murni) ialah kaum imigran abad ke-20 dan keturunan langsungnya yang belum begitu berakulturasi, masih berbahasa Cina dan secara kebudayaan berorientasi ke Cina. Golongan kedua, adalah masyarakat *peranakan* yang terdiri dari orang-orang dewasa maupun anak-anak yang dilahirkan di Indonesia, mempunyai orientasi ke Cina yang makin menipis dan mendapat pengaruh kebudayaan pribumi yang makin jelas, menggunakan bahasa pribumi untuk tujuan sehari-hari, dan oleh watak kebudayaannya yang

¹Mely G. Tan (Ed.), *Golongan Etnis Tionghoa di Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia, 1979, hal. 6-8; Victor Purcell, *The Chinese in Southeast Asia*, London, New York, Toronto: Oxford University Press, 1951, hal. 445-446.

²Hidayat Z.M., *op. cit.*, hal. 79.

³G. William Skinner, "Golongan Minoritas Tionghoa" dalam Mely G. Tan (Ed.), *Golongan Etnis Tionghoa di Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia, 1979, hal. 2; Edward J. Ryan, "The Value System of a Chinese Community in Java" (disertasi yang tidak diterbitkan untuk memperoleh gelar doktor dalam antropologi, Harvard University, 1961).

berbeda maka mereka pada umumnya bukan Cina, bukan pula Indonesia.¹ Perbedaan garis sosial di antara kedua golongan tersebut berlainan dari satu tempat ke tempat yang lain di Indonesia. Kedua golongan tersebut tidak saling berhubungan bukan karena perbedaan kemurnian etnik, tempat kelahiran, dan bahasa sehari-hari yang dipergunakan oleh orang Cina secara individu, tetapi hal tersebut merupakan suatu perbedaan sosio-budaya. Kepentingan politik dan sosialnya seringkali berbeda pula dan secara relatif kurang berkomunikasi atau memungkinkan suatu hubungan sosial.²

Menurut pengamatan Skinner, kaum totok lebih suka bekerja untuk dirinya sendiri dan pada umumnya berkecimpung dalam bidang usaha. Sedangkan kaum peranakan yang lebih beraneka ragam bidang pekerjaannya, menunjukkan bahwa mereka suka pekerjaan kejuruan dan pekerjaan administrasi atau menjadi staf di perusahaan-perusahaan besar. Kaum totok lebih menghargai kekayaan, sifat hemat, kerja, kepercayaan pada diri sendiri dan "keberanian" (dalam perdagangan suka berspekulasi) dibandingkan dengan kaum peranakan. Sedangkan kaum peranakan lebih cenderung menikmati hidup, waktu senggang, menghargai kedudukan sosial dan perasaan terjamin daripada kaum totok.³

Di kota besar atau kecil maupun di Jawa, kaum totok berkumpul di daerah pusat perdagangan; dengan ciri khas tinggal di rumah-rumah yang merupakan toko sekaligus tempat tinggal seperti yang juga terdapat di kota-kota di Tiongkok Tenggara. Sebaliknya, kaum peranakan tersebar luas di seluruh kota dan tinggal di rumah-rumah yang tidak asal bisa ditinggali saja. Mereka menunjukkan kesukaan akan rumah bergaya arsitektur Barat modern. Dalam banyak unsur struktur kekerabatan, kaum peranakan mulai meninggalkan ciri-ciri patrilokal, patrilineal dan patriarkal, yang sebenarnya merupakan dasar sistem tradisional Hokkien dan pada umumnya masih merupakan ciri khas yang berlaku di kalangan kaum totok dewasa ini. Ada kecenderungan yang jelas dalam kultus pemujaan leluhur untuk memuja leluhur menurut garis ibu maupun menurut garis ayah. Kekuasaan politik, ekonomi dan sosial yang masih dipusatkan di dalam keluarga menurut urutan generasi dan usia, pada kaum peranakan lebih terbagi sama rata di antara laki-laki dan wanita daripada kaum totok. Sesuai dengan peningkatan kedudukan wanita, kaum peranakan muda tidak menonjolkan bahwa mereka lebih suka sekali pada anak laki-laki daripada wanita, suatu sikap yang masih tampak pada kaum

¹G. William Skinner, *ibid.*, hal. 8; J.A.C. Mackie, *The Chinese in Indonesia*, Hong Kong, Singapore, Kuala Lumpur: Heinemann Educational Books (Asia) Ltd., 1976, hal. 5; B.P. Paulus, *op. cit.*, hal. 13.

²J.A.C. Mackie, *ibid.*, hal. 5; B.P. Paulus, *ibid.*, hal. 13.

³G. William Skinner, "Golongan Minoritas Tionghoa" dalam Mely G. Tan (ed.), *op. cit.*, hal. 11.

totok. Dibandingkan dengan kaum totok, kaum peranakan juga lebih sedikit simpatinya terhadap poligami. Kaum peranakan mempunyai keinginan jumlah anak sedikit yang berlawanan dengan keinginan kaum totok. Di antara kaum peranakan maupun totok jarang terdapat perceraian, tetapi setidaknya dalam sikap mereka, kaum peranakan lebih keras. Kaum peranakan terutama sekali bersifat kekeluargaan. Pada waktu memilih jodoh pertimbangan kekeluargaan dianggap lebih penting daripada di kalangan kaum totok. Pada hakikatnya, perkawinan yang diatur lebih lazim dilakukan di kalangan kaum peranakan. Kaum peranakan juga cenderung lebih nepotistis.¹

Di kalangan kaum peranakan, secara proporsional lebih banyak keluarga yang melakukan upacara pemujaan leluhur dan juga lebih teratur waktunya; suatu kenyataan yang membenarkan bahwa di kalangan kaum totok kekeluargaan tradisional makin kurang dipentingkan dan sekularisasi lebih besar. Dilihat dari sudut kegiatan dan penilaian diri, kaum muda peranakan lebih taat kepada agama. Dibandingkan dengan kaum totok, maka kaum peranakan lebih banyak yang beragama Kristen, karena sekolah-sekolah baik yang diselenggarakan oleh lembaga-lembaga Katolik maupun Protestan, telah melapangkan jalan bagi mereka untuk menjadi Kristen.²

Sebelum orang Belanda datang, orang Cina merupakan pedagang bebas. Sejak Belanda mulai menguasai Indonesia, kehidupan orang Cina banyak dipengaruhi oleh Belanda dan orang Cina hanya diperbolehkan berperan sebagai pedagang perantara, antara rakyat dan orang Belanda. Kebijaksanaan ini diambil Belanda, karena dalam usaha memonopoli mengumpulkan rempah-rempah orang Belanda dalam hal ini VOC, bersaing dengan orang Cina yang telah lama mendominasi perdagangan di Indonesia.

Orang Belanda dengan sengaja mempertajam kehidupan orang Cina menjadi eksklusif. Dengan kebijaksanaan ini Belanda bertujuan supaya baik penduduk pribumi maupun orang Cina supaya hidup dalam suasana tertutup dengan tradisinya yang dikelola oleh sistem pemerintahan masing-masing. Di Batavia khususnya didirikan perkampungan suku-suku bangsa seperti Kampung Jawa, Bali, dan seterusnya di mana setiap warga kampungnya hanya boleh bergaul dalam lingkungannya sendiri. Pelanggaran ketentuan ini dikenakan denda atau hukuman penjara. Orang-orang Cina ditempatkan di "pecinan" dan diharuskan melaksanakan adat-istiadat tradisional asli Cina supaya tetap berbeda identitasnya dari golongan-golongan lainnya.

Kebijaksanaan pemerintahan Belanda terhadap orang Cina makin berkembang sehingga mereka dapat menempati suatu posisi perantara penting yang disebut Wertheim sebagai "struktur kasta penjajahan" yang berdasar-

¹*Ibid.*, hal. 12-13.

²*Ibid.*, hal. 14.

kan atas sistem stratifikasi rasial di mana orang Cina berada di antara lapisan bawah mayoritas orang Indonesia dan lapisan atas, yaitu orang Eropa. Mereka terlibat khususnya sebagai pengumpul pajak (sehingga mempunyai kesempatan untuk menjalankan pemerasan terhadap rakyat), mengusahakan pegadaian, memonopoli garam dan perdagangan candu yang dilaksanakan atas nama pemerintahan Belanda. Dari kedudukan-kedudukan penting (key positions) tersebut memungkinkan mereka memperluas jaringan kontak perdagangannya menjadi pemberi pinjaman uang, pedagang besar dan pembeli bahan-bahan pokok guna pasaran ekspor, meskipun mereka hanya berhasil mendapat sedikit jalan ke arah sektor kehidupan ekonomi yang dikuasai oleh orang-orang Belanda, misalnya perkebunan, impor-ekspor, perdagangan secara besar-besaran dan perbankan, sampai masa berakhirnya penjajahan. Orang Cina makin kuat setelah mereka diberikan kedudukan hukum yang setara dengan orang Belanda, kecuali dalam tindakan kriminal kedudukan hukum mereka disamakan dengan kedudukan hukum pribumi.¹ Larangan lainnya bagi orang Cina adalah tinggal di desa-desa dan memiliki tanah-tanah.

Pemilikan tanah di luar kota dilarang dengan Undang-Undang Agraria tahun 1870, yang mengatur pembatasan kepemilikan tanah hanya kepada orang-orang pribumi saja, kecuali di beberapa tempat di mana orang Cina telah memiliki dan mengolah/mengusahakan tanah sebelum ketentuan/tanggal tersebut ditetapkan. Orang Cina juga dibatasi dalam kegiatan mereka oleh sistem Belanda, seperti diberlakukannya surat jalan (pas) dan pembatasan daerah tempat tinggal. Baru pada tahun 1914-1916 orang Cina diperbolehkan bergerak dan bebas bertempat tinggal. Pada tahun 1919 pembatasan tempat tinggal di daerah Jawa dihapuskan dan pada tahun 1926 penghapusan pembatasan ini lebih diperluas ke daerah-daerah propinsi di luar Pulau Jawa.

Pada waktu J.P. Coen mendirikan kota Batavia (1619) karena kurangnya penduduk, gubernur tersebut mengisinya dengan orang-orang Cina. Kemudian dari Batavia ini orang-orang Cina menyebar ke seluruh pantai utara Pulau Jawa dan masuk ke daerah pedalaman. Tetapi makin luas dan padat penduduk Cina mengkhawatirkan kompeni, sehingga timbullah saling curiga-mencurigai.

Jan Pieterzoon Coen (1618) lebih teliti dalam pengawasannya terhadap orang-orang Cina. Ia mengangkat Beng Kong menjadi kapten pertama untuk mengawasi orang-orang Cina. Di Jawa Tengah Belanda mengadakan perjanjian dengan Sultan Mataram dalam rangka membatasi kegiatan orang-orang Cina.²

¹Purcell, Victor, *The Chinese in Southeast Asia*, London, 2nd ed., 1965, Ch. 47; J.L. Vleming, *Het Chineseche Zakenleven in Nederlandsch Indie* (Batavia, 1926); J.A.C. Mackie, *op. cit.*, hal. 4-5; B.P. Paulus SH, *op. cit.*, hal. 12.

²Hidayat Z.M., *op. cit.*, hal. 77.

Di Semarang pada tahun 1672 orang Cina dipusatkan dan Kwee Kiauw diangkat sebagai kaptennya. Tetapi setelah Batavia didirikan orang Cina harus tinggal di luar benteng. Mereka menanam padi dan tebu serta menjadi pedagang buah-buahan. Gubernur Jenderal J.P. Coen menginginkan orang Cina di Batavia tidak lebih dari 350 orang jumlahnya. Orang Cina kemudian mengusahakan perkebunan tebu dan Belanda mengusahakan pabriknya. Karena Coen menginginkan Batavia menjadi kota perdagangan yang terbesar di Indonesia, maka untuk mencapai hal tersebut para imigran Cina baru didatangkan secara besar-besaran.

Organisasi dagang Cina yang disebut "Tiong Hwa Hwee Kwan" didirikan pada tahun 1902 dengan tujuan sebagai berikut:

- a. Untuk memupuk rasa nasionalisme Cina;
- b. Menyatukan keturunan;
- c. Mempelajari kembali bahasa Cina yang telah diabaikan oleh para perantaraan;
- d. Melindungi kepentingan golongan Cina.

Pada tahun 1911 organisasi tersebut telah berkembang ke seluruh kota-kota di Indonesia, di mana kegiatannya bukan saja dalam bidang perdagangan saja, tetapi juga dalam kegiatan politik yang berhubungan dengan pemerintah negeri leluhurnya. Berkenaan dengan ini gerakan pembaharuan di negeri Cina pada permulaan abad ke-20 mendapat dukungan dari orang Cina perantaraan.¹

Pada tahun 1914 Serikat Islam didirikan dengan tujuan mempertahankan dan mengimbangi menyebarluasnya perdagangan Cina, walaupun ada orang Cina yang beragama Islam (Party Tionghoa Islam Indonesia) di Makassar.² Di samping kedudukan orang Cina yang makin baik dan kuat itu, mereka juga mendapat perwakilan dalam lembaga-lembaga pemerintahan Hindia Belanda.

Perwakilan orang Cina dalam Volksraad ada 3 sampai 5 orang. Akan tetapi pada 1918 ada juga Cina yang menolak perwakilan dalam Volksraad. Banyak di antara keturunan orang Cina dari generasi ke-3 dan ke-4 menyatakan kehadiran mereka di Indonesia hanya untuk sementara saja. Oleh karena itu orang Cina Indonesia terbagi dalam beberapa golongan:³

- a. Golongan yang tertarik pada politik di negeri leluhurnya;
- b. Golongan yang tertarik kepada perjuangan dan pergerakan rakyat Indonesia;

¹*Ibid.*, hal. 79 dan 91.

²*Ibid.*, hal. 79.

³*Ibid.*, hal. 81.

c. Golongan yang secara demonstratif berkeinginan untuk tetap bekerjasama dengan pihak pemerintah kolonial.

Pada tahun 1909 didirikan pula suatu organisasi Kamar Dagang "Shiang Hwee" dengan tujuan:

- a. Melindungi kepentingan dagang orang Cina dari diskriminasi yang diadakan oleh Pemerintah Hindia-Belanda dan perusahaan dagang orang pribumi;
- b. Menjadi penghubung antara orang Cina perantauan dengan Pemerintah Cina di negeri leluhurnya, dengan tujuan untuk mengumpulkan dana bantuan material untuk negara leluhurnya.

Pada tahun 1911 orang Cina mendirikan organisasi "Li Po Sia" sebagai pusat organisasi Kuo Min Tang. Dengan demikian kegiatan orang-orang perantauan sampai tahun 1930-an terutama bergerak dalam bidang:

- a. politik (Li Po Sia);
- b. ekonomi (Shiang Hwee);
- c. pendidikan;
- d. Tiong Hwa Hwee Koan.

Kebijakan Belanda yang bersifat eksklusivisme kultural mulai ditinggalkan pada tahun 1908, sekolah-sekolah Belanda segera dibuka untuk anak-anak kaum peranakan baik di kota-kota besar maupun di kota-kota kecil yang penting. Perubahan-perubahan yang terjadi selanjutnya pada sistem hukum Hindia-Belanda telah memberikan golongan elite peranakan suatu status yang lebih dekat kepada status orang Belanda dan orang Indo-Eropa, dan makin jauh dari status penduduk pribumi.

Pada tahun 1920 organisasi *Chung Hua Hui* didirikan oleh orang Cina yang berpendidikan Belanda. Tujuannya adalah memiliki nasionalisme dan kebudayaan negeri leluhurnya. Pada tahun 1939 organisasi tersebut mendapat perwakilan dalam Volksraad. Pada tahun 1932 didirikan suatu partai Tiong-hoa Indonesia, yang juga mempunyai perwakilan dalam Volksraad dalam tahun yang sama. Partai ini bertujuan supaya orang-orang Cina perantauan menjadi WNI dan melepaskan diri dari kewarganegaraan negeri leluhurnya.

Pada tahun 1925 pergerakan orang Cina dan Indonesia komunis bersatu, tetapi kesatuan ini kemudian pecah kembali, karena masing-masing pihak mempunyai tujuan yang berbeda. Pada tahun 1930 suatu partai baru terbentuk dengan dasar persatuan antar ras untuk kesejahteraan bersama, tetapi

¹*Ibid.*, hal. 93.

juga gagal. Pada tahun 1940 semangat nasionalisme Cina masih kuat, meskipun ada di antaranya yang ikut dalam pergerakan nasionalis Indonesia. Kemudian banyak di antaranya belajar di Nederland, sehingga kecenderungannya lebih berorientasi ke kebudayaan Barat. Pada waktu mereka ini kembali ke Indonesia, mereka mulai menyerang dan mengkritik orang Belanda supaya memberikan perlindungan terhadap orang Cina dari ancaman penduduk pribumi dan nasionalis Indonesia. Kesadaran nasionalisme Cina memang telah dipupuk dan dibina dengan sengaja oleh pemerintah negeri leluhurnya sejak abad ke-19, yaitu politik kebudayaan melalui pendidikan.

Pada masa pemerintahan Jepang semua organisasi Cina dihapuskan dan dibentuk organisasi *Hua Tsung Hui* yang pemimpinnya ditunjuk oleh Jepang. Tujuan organisasi terutama untuk memudahkan pemungutan pajak dan sumbangan-sumbangan dari orang Cina untuk ongkos perang.

Pada masa revolusi fisik (1945-1949) dan permulaan berdirinya Pemerintah RI, orang Cina disatukan dalam wadah "Chung Hua Tsung Hui."

Karena situasi dan kondisi pada masa revolusi fisik ini orang Cina terbagi dalam 3 golongan:

1. Golongan Cina yang berada di wilayah kekuasaan Belanda. Mereka ini tetap pada usahanya mencari keuntungan dari situasi apa pun yang dihadapinya. Mereka berusaha melayani kebutuhan Belanda sebaik-baiknya. Untuk keperluan ini Belanda mendirikan suatu organisasi semi militer "Pao An Tui," tahun 1947 di Jakarta, organisasi ini diberi latihan dan pendidikan, serta dipersenjatai oleh Belanda. Tujuan organisasi ini di samping untuk membela keselamatan orang Cina, juga memberi tambahan pertahanan bagi Belanda dari orang-orang Cina. Pada tahun 1949 gerakan ini meluas ke seluruh Pulau Jawa. Pemerintah RI akhirnya menindak gerakan ini.
2. Golongan Cina yang berada di wilayah RI. Orang Cina ini ikut berusaha membantu perjuangan menegakkan kemerdekaan RI.
3. Golongan Cina intelektual sebagai hasil pendidikan Belanda. Mereka juga dalam politiknya berpihak kepada Belanda.

Dengan demikian ada 3 golongan Cina:

- a. Golongan yang telah masuk WNI;
- b. Golongan Cina WNA RRC;
- c. Golongan Cina yang masih tidak pasti atau tidak ada kewarganegaraannya atau stateless yang tidak jelas orientasi atau kecenderungan dan lebih dekat ke Taiwan.

PENUTUP

Dari cuplikan sejarah kelompok keturunan Cina di Indonesia yang dikemukakan di atas, ternyata bahwa mereka merupakan kelompok yang pluralistik dan banyak ditentukan oleh lamanya menetap di Indonesia, asal-usul nenek moyangnya, peranan yang berkaitan dengan pekerjaannya serta ideologi politik yang dianutnya.

Manusia tidak dapat dipisahkan dari sejarah pergerakannya dan sering kali terdengar bahwa masa kini ditentukan oleh masa lalu atau merupakan akibat masa lampau. Tetapi dalam mempelajari masalah kelompok keturunan Cina di Indonesia sebaiknya ditempatkan dalam konteks waktu yang kontemporer mengingat perubahan sosial yang terjadi yang tidak terlepas dari situasi dan tuntutan jamannya. Masa lampau merupakan cermin yang mengingatkan pada pengalaman dan merupakan pelajaran untuk masa yang akan datang.

